

INOVASI TEKNOLOGI BERBASIS *SMART POWER* UNTUK KEAMANAN PERBATASAN NEGARA (STUDI DI PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE)

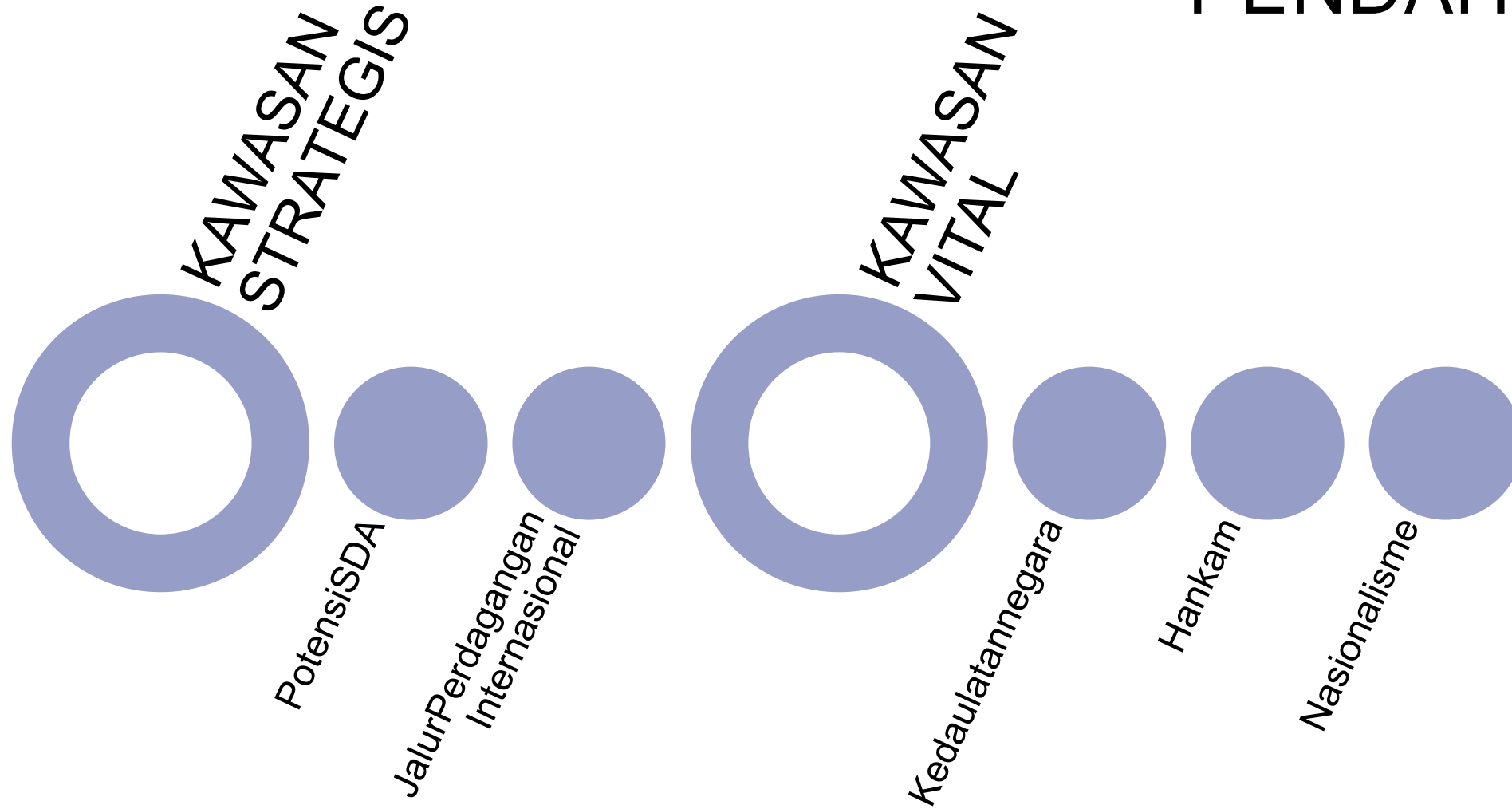
Dr. Chairil Nur Siregar, MS.,MH

Dr. Epin Saepudin, M.Pd

Kelompok Keahlian Ilmu-Ilmu Kemanusiaan

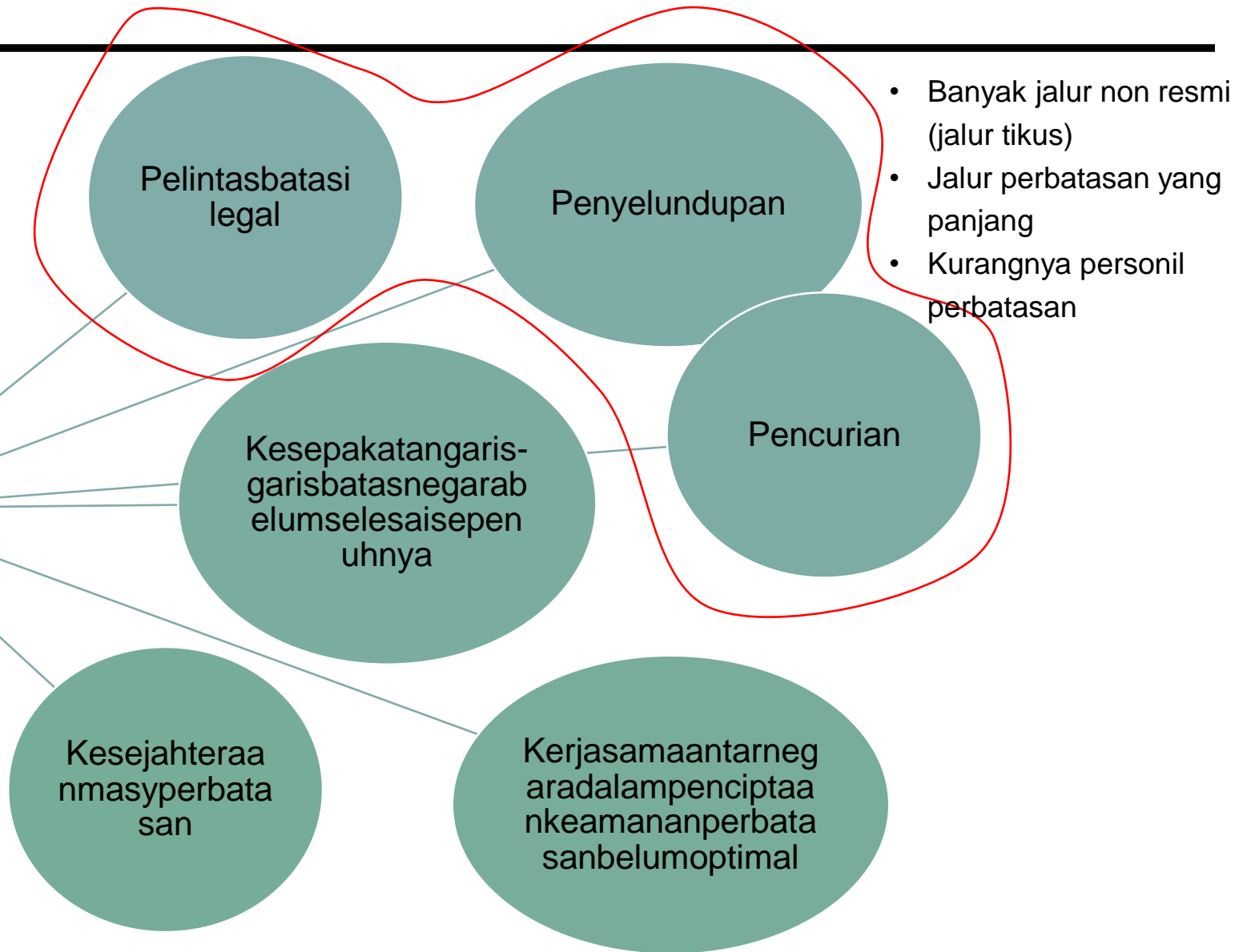
Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung

PENDAHULUAN





BEBERAPA ISU PERBATASAN





WILAYAH INDUK

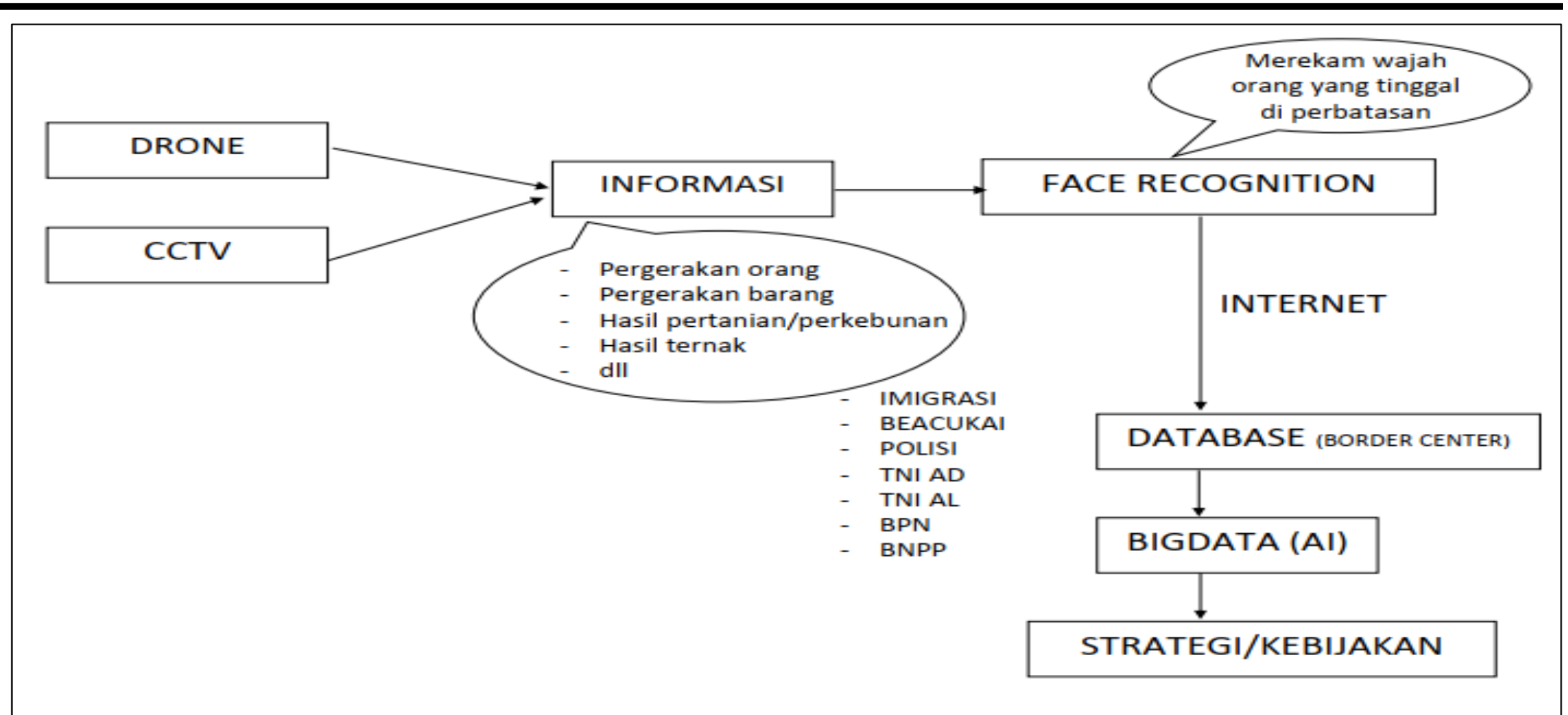
WILAYAH KANTONG

KONDISI GEOGRAFIS PERBATASAN INDONESIA-RDTL

-
- Perbatasan darat Indonesia di Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste secara keseluruhan memiliki panjang 268,8-kilometer yang terbagi menjadi dua alur wilayah, yakni sektor barat dan sektor timur (Madu, 2010)
 - Sektor barat terdiri dari Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara (Indonesia) berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi (Timor Leste), sedangkan sektor timur yakni Kabupaten Belu (Indonesia) berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro (Timor Leste).
 - Panjangnya jalur perbatasan Indonesia dengan Timor Leste memerlukan perhatian yang ekstra, terutama dari aspek pertahanan keamanan ditengah keterbatasan personil penjaga jalur perbatasan negara.
 - **Perlu inovasi teknologi dibidang pertahanan keamanan agar kawasan perbatasan dapat terjaga secara lebih efektif, efisien, dan optimal, terutama dalam monitoring Kawasan perbatasan**
-

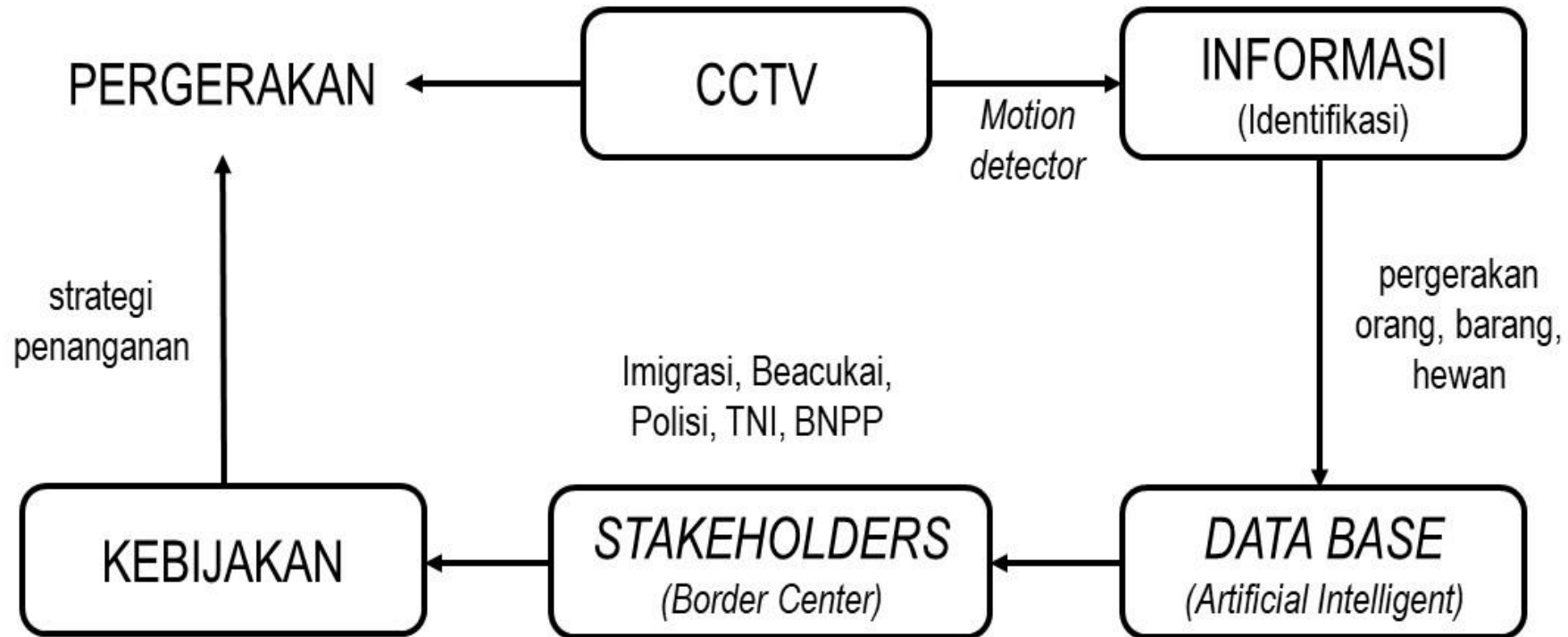
KEKUATAN NEGARA & KEAMANAN PERBATASAN

- Konsepsi keamanan sebagai perilaku negara dalam mengantisipasi segala bentuk ancaman keamanan nasional dengan menggunakan pendekatan militer (Sudiar, 2019; Atzili, 2012; Coyle, 2018; Prescott & Triggs, 2008).
 - Terjadi pergeseran dan perluasan makna konsepsi keamanan, yakni lebih berfokus pada keamanan individu dan masyarakat (Nishikawa, 2010).
 - Terminologi keamanan manusia dapat dilihat melalui pendekatan *narrow human security* dan *broad human security* (Alberth & Carlsson, 2009).
-



Gambar 1. Sistem Pengamanan Perbatasan melalui Pemanfaatan Teknologi

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK KEAMANAN PERBATASAN



Gambar 2. Sistem Pengamanan Perbatasan melalui Pemanfaatan Teknologi

- Software/aplikasi yang dikembangkan diharapkan dapat membantu stakeholders perbatasan untuk melakukan kontroling dan penjagaan sepanjang wilayah perbatasan negara, terutama pada jalur-jalur tradisional yang disinyalir berpotensi sebagai jalur pelintas illegal ditengah kurangnya personil
- Melalui pemanfaatan alat ini, diharapkan dapat pula meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar *stakeholders* perbatasan yang selama ini masih ditemukan ego sektoral.

PENDEKATAN *SMART POWER* UNTUK KEAMANAN PERBATASAN



Ketiadaan atau keterbatasan sumber kehidupan ekonomi, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang rendah pada masyarakat di perbatasan, dan juga “warga baru” di tempat pengungsian dan *resettlement*, secara potensial dapat menjadi sumber ancaman keamanan (Ganewati, 2009).

Smart power diperlukan untuk menghadapi ancaman yang bersifat multidimensional dengan tingkat kompleksitas yang tinggi

SIMPULAN

- Inovasi teknologi diperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kawasan perbatasan negara dibidang pertahanan keamanan.
 - Keberadaan sistem keamanan berbasis teknologi informasi ini diharapkan dapat membantu tugas Polisi dan TNI yang berada di perbatasan ditengah kurangnya jumlah personil
 - *Software* keamanan perbatasan yang dikembangkan dapat digunakan oleh *stakeholders* perbatasan (Imigrasi, Bea Cukai, Badan Karantina Pertanian, TNI, Polri, PLBN), terutama dalam memantau aktivitas pelintas batas pada jalur-jalur non-resmi.
 - Output yang dihasilkan dari penerapan sistem ini berguna sebagai deteksi dini (data awal) yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dalam menentukan langkah dan kebijakan selanjutnya.
 - Pendekatan smart power diperlukan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah perbatasan negara, dimana kompleksitas ancaman terhadap negara tidak hanya mencakup aspek militer tetapi juga ancaman nirmiliter.
 - Inovasi teknologi hanya bersifat pendukung, sedangkan yang utama adalah komitmen dan konsistensi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menempatkan daerah perbatasan sebagai etalase negara yang harus diperhatikan kemajuan, pembangunan, dan kesejahteraannya.
-

Terima Kasih
